

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO

**Sri Kasiami**

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro  
Jl. Lett Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro  
Email : [srikasiami@gmail.com](mailto:srikasiami@gmail.com)

### **Abstract**

*The incidence of disasters is increasing every year, prevention and preparedness in every area close to potential disasters is very important. Geographical conditions of Bojonegoro Regency are disaster-prone areas, including natural disasters, landslides, floods, tornadoes, drought, fire, non-natural disasters, failures. industry that can cause environmental damage, property loss, psychological impact, and casualties, as well as social disasters in the form of conflicts. So it is necessary to anticipate and control efforts in a coordinated, integrated, fast and precise manner. This study aims to describe the implementation of disaster mitigation policies in Bojonegoro district. The theory used in this research is the theory of George C. Edward III, which includes: communication, bureaucratic structure, executing or implementing resources, executing disposition. The method used in this research is a descriptive type with a qualitative approach. Data collection was carried out by in-depth interviews, documentary studies and observations. The results showed that in implementing disaster mitigation policies in Bojonegoro Regency, policy implementers had the same willingness and commitment, namely that they would try to save communities affected by disasters that occurred. Implementation of disaster mitigation policies in Bojonegoro Regency is in accordance with the principles of disaster management contained in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management regarding the priority principle of saving lives.*

*Key words: Policy Implementation, Disaster Mitigation*

### **Abstrak**

Kejadian bencana setiap tahun terus meningkat, pencegahan dan kesiapsiagaan di tiap daerah yang dekat dengan potensi bencana sangat penting. Kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro termasuk daerah rawan bencana, meliputi bencana alam, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, bencana non alam, kegagalan industri yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, serta bencana sosial dalam bentuk konflik. Sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat serta tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di kabupaten bojonegoro. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori George C. Edward III yang meliputi: komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya pelaksana atau implementator, disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro, pelaksana kebijakan mempunyai kesediaan dan komitmen yang sama yaitu akan berusaha untuk menyelamatkan masyarakat terdampak bencana yang terjadi. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengenai prinsip prioritas penyelamatan jiwa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Mitigasi Bencana

## PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang di sebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana). Penanggulangan bencana semakin mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah di Indonesia. Ini terbukti dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 33 provinsi serta 497 BPBD di tingkat kabupaten/kota. Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008, Menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksanaan Penanganan Bencana (satlak PB) di tingkat kabupaten atau kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005. Kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro termasuk daerah rawan bencana, meliputi bencana alam, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan kebakaran, bencana non alam, kegagalan industri yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, serta bencana sosial dalam bentuk konflik dan lain-lain sehingga perlu di lakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat sertatepat. Hal ini di lengkapi dengan beberapa kebijakan operasional yang mencerminkan bahwa badan penanggulangan bencana memiliki komitmen yang kuat terhadap berbagai peristiwa bencana alam yang merugikan masyarakat baik jiwa maupun harta benda.

Terjadinya bencana di Kabupaten Bojonegoro perlu diantisipasi dan ditanggulangi semua pihak, karena setiap musim kemarau maupun penghujan Kota Ledre dapat dipastikan akan terjadi bencana alam mulai banjir Bengawan Solo maupun banjir bandang, kekeringan, tanah gerak maupun yang lainnya. Padahal, Kabupaten Bojonegoro yang terbagi menjadi 28 kecamatan sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2012, tentang penanggulangan bencana. Tetapi kesiapsiagaan terkait kebencanaan belum sepenuhnya tertangani secara maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, sepanjang tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro terjadi bencana sebanyak 392 kejadian, dengan jumlah desaterdampak sebanyak 695 desa, korban terdampak 20.801 kepala keluarga (KK) dan total kerugian material mencapai Rp 15.44 miliar. Untuk diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, setidaknya terdapat 10 potensi ancaman bencana, yaitu: 1). Bencana Banjir Bengawan Solo; 2). Bencana Banjir Luapan (Genangan); 3). Bencana Banjir Bandang; 4). Bencana Tanah Longsor; 5). Bencana Angin Kencang; 6). Bencana Kekeringan; 7). Bencana Kebakaran Rumah atau pemukiman; 8). Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan; 9). Bencana Gempa Bumi; dan 10). Bencana Kegagalan Teknologi atau Industri. Namun sepanjang tahun 2019, hanya 8 ancaman yang ada kejadian bencananya, sementara 2 ancaman bencana lainnya, yaitu bencana gempa bumi dan kegagalan teknologi atau industri, tidak terjadi (beritabojonegoro.com, 2019).

Tabel 1  
 Kejadian bencana di Kabupaten Bojonegoro  
 tahun 2019

Jenis Bencana	Jumlah kejadian	Jumlah desa terdampak	Jumlah korban terdampak	Kerugian material
Banjir bengawan solo	1	32	1.038 jiwa	Rp. 1,84 miliar
Banjir luapan (genangan)	14	61	2.653 jiwa	Rp. 2,99 miliar
Banjir bandang	4	6	558 jiwa	-
Tanah longsor	12	12	-	Rp. 41 juta
Angin kencang	59	282	2.784 jiwa	Rp. 5,41 miliar
Kekerangan	79	79	13.649 jiwa	-
Kebakaran rumah atau pemukiman	119	119	119 jiwa meninggal	Rp. 5,06 miliar
Kebakaran hutan atau lahan	104	104	-	Rp. 93,9 juta

(Sumber: BPBD Bojonegoro, 2020).

Dampak perubahan iklim maupun pemanasan global sangat berpengaruh di Bojonegoro yang menyebabkan terjadinya bencana. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup selalu mewaspadai terjadinya bencana baik banjir bengawan solo, banjir bandang dan yang lainnya (bojonegorokab.go.id, 2020).

Hujan deras memicu terjadinya banjir di wilayah Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur pada Jumat (24/1/2020). Akibat hujan, debit air di Sungai Pacal meluap sehingga berdampak banjir di wilayah tersebut. BPBD Kabupaten Bojonegoro melaporkan kerugian materiil dengan terendamnya 257 unit rumah, 1 hektar

sawah, 1 unit mushola dan jalan desa sepanjang 500 meter. Peristiwa alam tersebut tidak mengakibatkan terjadinya korban meninggal dunia. Pascainsiden, BPBD melakukan pendataan dan memonitor situasi wilayah terdampak. Sementara itu masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan lumpur yang berada di dalam pascabanjir (bnpb.go.id, 2020). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, terus melakukan persiapan dalam menghadapi bencana, dengan melihat langsung pintu-pintu air guna mengantisipasi bencana banjir yang biasanya terjadi saat musim penghujan. "Pintu-pintu air, doorlat serta beberapa perahu karet terus disiapkan untuk antisipasi banjir," kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro, Eko Susanto. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pengecekan ke tempat-tempat yang biasa dijadikan pengungsian serta dapur umum saat terjadi bencana banjir, serta terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, BPBD Bojonegoro telah melakukan pemetaan daerah rawan, hal itu dilakukan untuk mendeteksi lebih dini daerah rawan agar nanti bisa menentukan langkah penanggulangannya (blokBojonegoro.com,2020).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini ialah 1) Komunikasi, 2) Struktur birokrasi, 3) Sumber Daya Pelaksanaan dan implementator, 4) Disposisi pelaksana. Teknik penentuan informan dengan cara atau narasumber dan teknik sampling yang meliputi: Probability sampling dan Nonprobability Sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dan data primer. Metode analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Pada pernyataan informan tentang komunikasi, adapun pertanyaan yang diajukan ialah sebagai berikut:

“Kepada siapa sajakan komunikasi dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro?”

Kemudian sesuai hasil wawancara dengan Bapak Eko Susanto menyampaikan:

“Komunikasi harus dibangun dengan pihak pelaksana kebijakan dan pihak penerima kebijakan membangun komunikasi kultural. Mengikutsertakan tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan. Mengikutsertakan semua pihak termasuk pemerintahan, militer, kepolisian dan masyarakat dalam pengambilan keputusan setiap unit atau perseorangan mengetahui tugas masing-masing.” (Hasil wawancara, tanggal 24 Agustus 2020)

### 2. Struktur Birokrasi

Seperti pernyataan George Edward III bahwa implementasi kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka jalannya kebijakan akan terhambat meskipun sumber daya yang tersedia memadai. Untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi maka diperlukan adanya suatu SOP (Standart Operating Procedure) yang mengatur tata aliran pelaksanaan suatu kebijakan dan cara-cara pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya SOP maka birokrasi bisa menjalankan fragmentasi SOP, yaitu kegiatan sehari-hari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas rutinnnya sesuai dengan standar yang ada.

### 3. Sumber daya manusia

George Edward III menyatakan bahwa diantara sumber daya yang lainnya, sumber daya manusia berada pada urutan yang terpenting. Keberhasilan implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Agar implementasi kebijakan berjalan efektif maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dan juga dibutuhkan sumber daya dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.

### 4. Disposisi Pelaksana

Menurut George Edward III, disposisi merupakan sikap atau komitmen para implementator untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan, selain keahlian, pelaksanaan kebijakan juga membutuhkan kesediaan dan komitmen agar pelaksanaan kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik.

## KESIMPULAN

Pada komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoroyaitu dengan mengikutsertakan semua pihak termasuk pemerintahan, militer, kepolisian dan masyarakat dalam pengambilan keputusan setiap unit atau perseorangan mengetahui tugas masing-masing. Komunikasi yang terjalin yaitu antara: a) pemerintahan tingkat kecamatan; b) pemerintahan tingkat desa; c) kapolsek; d) koramil; e) organisasi masyarakat; f) tokoh masyarakat; g) masyarakat terdampak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya rapat koordinasi yang menghasilkan kebijakan di tingkat kecamatan berupa SOP dan Mapping serta patuhnya masyarakat terhadap setiap himbuan pemerintah mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana. Permasalahan komunikasi biasanya muncul ketika tidak adanya kesepakatan antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan, akan tetapi hal ini telah diselesaikan dengan proses komunikasi secara kultural. Sehingga perlu dibangun pola komunikasi yang lebih baik lagi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan mitigasi bencana melihat Kabupaten Bojonegoromerupakan daerah yang

memiliki risiko bencana agar pelaksanaan dilapangan bisa berjalan lebih baik dan lancar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung:2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta, Jakarta:2014.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Info Bencana: Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual*. BNPB, Jakarta:2014.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Rencana nasional Penanggulangan bencana 2015-2019*. BNPB, Jakarta: 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika, Jakarta: 2007.
- <http://blokbojonegoro.com/2018/07/11/waspad-a-bencana-penanganan-perubahan-iklim-di-bojonegoro-belum-masih/>
- <http://blokbojonegoro.com/2020/01/24/antisipasi-asi-bencana-bpbd-cek-pintu-air/>
- <https://bnpb.go.id/berita/hujan-picu-banjir-di-wilayah-bojonegoro>
- <https://beritabojonegoro.com/read/19093-sepanjang-2019-di-bojonegoro-terjadi-392-bencana-total-kerugian-capai-rp-15-miliar-lebih.html>
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta:2001.
- Kurniawan, Lilik. *Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013*. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Jakarta:2014.
- Londok, Christo Imanuel. 2014. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi:Manado.

- Mahdiyah. *Statistika Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung:2010.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2011.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung:2011.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
- Sandhyavitri, Ari. *MITIGASIBencana Banjir dan Kebakaran*. UR Press Pekanbaru, Pekanbaru: 2015.
- Setyowati, Atrin Chrisopras. 2018. *Implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Bojonegoro.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung: 2016.
- Suprpto. *Atlas Kebencanaan Indonesia 2011*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Informasi Geospasial, Jakarta:2012.
- Susanto, A.B. *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana*. Aksara Grafika Pratama, Jakarta: 2006.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenanda Media Group, Jakarta:2005.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia, Jakarta: 2008.